

MITIGASI PERUBAHAN IKLIM DI ASEAN



**ASEAN PARLIAMENTARIANS
FOR HUMAN RIGHTS**

Asia Tenggara sedang menghadapi krisis perubahan iklim yang mengancam hak-hak asasi penduduknya. Anggota parlemen memegang peran kunci guna menjamin tanggapan yang memadai dari negara atas darurat iklim tersebut. Dokumen ini bertujuan menguraikan informasi kunci dan langkah-langkah yang dapat diambil para legislator di Asia Tenggara untuk memastikan aksi mitigasi perubahan iklim dengan memadai

APA ITU MITIGASI PERUBAHAN IKLIM

Perubahan iklim mengacu pada kenaikan suhu global yang disebabkan oleh akumulasi gas rumah kaca di atmosfer. Ada dua cara menangani dampak-dampak perubahan iklim: **mitigasi perubahan iklim**, yakni aksi mengurangi akumulasi gas-gas rumah kaca. **Adaptasi perubahan iklim**, yakni meminimalkan dampak perubahan iklim terhadap masyarakat.

APA ITU PERJANJIAN PARIS?

Lebih dari 180 negara telah meratifikasi Perjanjian Paris tentang perubahan iklim yang berlaku sejak November 2016. Termasuk di dalamnya adalah semua negara anggota ASEAN dan Timor Leste. Salah satu tujuan dari perjanjian itu adalah pembatasan kenaikan suhu dunia hingga: “jauh di bawah 2 Celcius di atas tingkat pra-industrial dan mengejar berbagai upaya membatasi kenaikan suhu sampai 1,5 Celcius di atas tingkat pra-industrial.”

APA ITU KOMITMEN KONTRIBUSI NASIONAL?

Guna mencapai tujuan Perjanjian Paris, semua negara harus menyerahkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Desember 2020 rencana aksi nasional (RAN) yang disebut “Komitmen Kontribusi Nasional” (Nationally Determined Contributions, NDC). Dokumen ini memaparkan bagaimana negara-negara berniat mengurangi emisi gas rumah kaca sesuai tujuan-tujuan Perjanjian Paris. Semua negara ASEAN dan Timor Leste telah mengajukan RAN. Dokumen ini ditinjau ulang setiap 5 tahun, yang pertama pada November 2021 dalam sidang COP 26 di Inggris.



APA ITU COP 26?

Perjanjian Paris ditandatangani pada 2015 di bawah Konferensi para Pihak (Conference of the Parties, COP) Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC). Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) COP diselenggarakan setiap tahun. KTT COP tahun depan akan menjadi KTT yang ke-26, sedianya diselenggarakan di Glasgow, Inggris, pada November 2021, tetapi ditunda karena pandemi COVID-19. Rencananya ini menjadi COP pertama yang meninjau ulang RAN perubahan iklim masing-masing negara.

ADA APA DENGAN RAN NEGARA-NEGARA ASEAN?

Menurut PBB, RAN dunia sangat tidak memadai dan tidak pada jalur yang tepat untuk memenuhi tujuan Perjanjian Paris membatasi kenaikan suhu hingga “jauh di bawah 2 Celcius.” Malah, dunia berjalan menuju kenaikan 3,2 Celcius suhu dunia, sebuah skenario katastrofik bagi rakyat Asia Tenggara. Semua RAN Asia Tenggara telah dinilai oleh para ilmuwan “tidak mencukupi” mencapai Perjanjian Paris, sedangkan RAN Indonesia dan Singapura dinilai “sangat tidak mencukupi”

APA YANG SEHARUSNYA DILAKUKAN PEMERINTAH?

Mempertimbangkan tidak memadainya ambisi RAN di antero kawasan dan skenario katastrofik yang dihadapi, pemerintah negara-negara ASEAN harus mengajukan kembali sebelum KTT COP 26 **RAN yang diperbaiki** dengan tujuan-tujuan yang lebih ambisius sesuai dengan Perjanjian Paris pada akhir 2020. Timor Leste, Myanmar, Laos dan Kamboja telah berkomitmen memperbaiki RAN mereka. Pemerintah negara-negara ASEAN yang lain harus juga berbuat yang sama.

APA YANG DAPAT DILAKUKAN ANGGOTA PARLEMEN?

Mendesak pemerintah Anda menyampaikan RAN baru yang lebih ambisius pada Desember 2020. Saat ini, hanya Timor Leste, Myanmar, Laos dan Kamboja yang telah berkomitmen memperbaiki RAN mereka. Pemerintah negara yang lain di ASEAN harus juga melakukan hal serupa. Di bawah ini rekomendasi spesifik untuk masing-masing negara.

Buatlah pemerintah Anda bertanggung jawab dengan meminta, di Parlemen, penjelasan pemerintah tentang keputusan untuk tidak memperbaiki RAN-nya di tengah ancaman situasi katastrofik

Pembahasan anggaran adalah peluang yang baik mendiskusikan aksi pemerintah tentang mitigasi perubahan iklim. Tingkatkan kesadaran dan dorong dialog di antara konstituen Anda dan para pengambil keputusan tentang pentingnya aksi atas perubahan iklim, manfaatkan media dan acara-acara publik.

Gunakan panitia atau komisi di parlemen. Pastikan komisi atau panitia dimana Anda menjadi anggotanya secara resmi mengintegrasikan perubahan iklim sebagai pertimbangan penting dan bekerja samalah dengan para ahli iklim, organisasi masyarakat sipil, dan sebagainya

Di sejumlah negara, panitia atau komisi tertentu dapat mengajukan pertanyaan tentang kinerja pemerintah dalam mencapai Perjanjian Paris dan meminta jawaban tertulis

Kenali tujuan Perjanjian Paris dan rekomendasi ilmiah pengurangan emisi gas rumah kaca di negara Anda. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di bagian rekomendasi di bawah. Berdiskusilah dengan ilmuwan-ilmuwan iklim dan para pemangku kepentingan lain, termasuk masyarakat sipil di daerah Anda.

Tanyakan keprihatinan konstituen tentang iklim. Misalnya, bagaimana kehidupan mereka ketika lingkungan hidup berubah. Jangkauilah juga mereka yang tidak dapat memilih seperti anak-anak dan pendatang.

Anda dapat menyuarakan keluhan-keluhan mereka untuk menganjurkan perlunya meningkatkan sasaran iklim dan memastikan berbagai pendekatan perubahan iklim yang memenuhi kebutuhan konstituen Anda.

Mintalah informasi tentang RAN negara pada narahubung terkait di pemerintah dan minta pula agar Anda dapat masuk dalam delegasi negara Anda dalam KTT COP26 pada November 2021. Ini dapat memastikan meningkatnya pengawasan parlemen dalam proses negosiasi dan peninjauan ulang RAN.

BEKERJA SAMA DENGAN UNFCCC

Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) adalah suatu perjanjian internasional yang diadopsi pada 1992. Tujuannya adalah “stabilisasi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer sampai tingkat yang mampu mencegah campur tangan manusia dalam sistem iklim.” Masing-masing negara memiliki National Focal Point (NFP) yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Tugas NFP adalah sebagai penghubung dengan UNFCCC dan menyebarkan informasi di tingkat nasional

Para Anggota Parlemen dapat menghubungi NFP UNFCCC negaranya untuk mengetahui lebih jauh tentang RAN dan menganjurkan peningkatan sasaran di dalamnya.

CAMBODIA

H.E. Mr. Say Samal, Minister, Ministry of Environment (1)
Mr. Mao Hak, Director, General Secretariat of National Council for Sustainable Development (2)

☎ (855-23) 21-3908 / 4-27894 (1)
✉ moe-cabinet@camnet.com.kh (1)
✉ cceap@online.com.kh(2)

INDONESIA

Bapak Ruandha Agung Sugardiman, Direktur Jenderal di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

☎ (62-21) 5730 144
✉ nfppc.indonesia@gmail.com

MALAYSIA

Mr. Jaya Singam Rajoo, Senior Undersecretary (1)
Mr. Md Yusup Yasmazy, Principal Assistant Secretary (2)
Ministry of Energy, Science, Technology, Environment and Climate Change.

☎ (60-3) 8885-8690 (1)
✉ jayasingam@mestecc.gov.my (1)
☎ (60-3) 8885-8675 (2)
✉ yusmazy@mestecc.gov.my (2)

MYANMAR

Mr. Hla Maung Thein, Director General For Environmental Conservation Department, Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation.

☎ (95-67) 431343
✉ dg.ecd@moecaf.gov.mm
✉ hlamaungthein.env@gmail.com

THE PHILIPPINES

H.E. Mr. Emmanuel De Guzman, Minister and Vice Chairperson of the climate change commission (1)
Ms. Noralyn Jubaira-Baja, Assistant Secretary of the climate change commission (2)

☎ (63-2) 735-6201 / 564-1451 to 80 (1)
✉ emmanuel.m.deguzman@gmail.com
✉ osec.ccc.ph@gmail.com (1)
✉ unio.div2@dfa.gov.ph (2)

SINGAPORE

Mr. Cheah Sin Liang, Lead Coordinator for Climate Negotiations, Deputy Director, Strategy Group, Prime Minister's Office

☎ (65) 6354 9221, (65) 6354 9218
✉ nccs_international@pmo.gov.sg
✉ cheah_sin_liang@pmo.gov.sg

TIMOR-LESTE

Mr. Adao Soares Barbosa, National Focal Point for UNFCCC, Secretariat of State for Environment and Reforestation

☎ (670) 333-1118
✉ adaosoaresb@yahoo.com

THAILAND

Ms. Natthanich Asvapoositkul, Director, Climate Change Management and Coordination Division, Ministry of Natural Resources and Environment

☎ (66-2) 265 6690
✉ natthan.asv@gmail.com
✉ unfccc.thailand.focalpoint@gmail.com

REKOMENDASI PENINGKATAN RENCANA AKSI IKLIM

Tabel berikut meringkas rekomendasi ilmiah kunci bagi RAN negara-negara ASEAN agar sesuai dengan tujuan mitigasi iklim Perjanjian Paris. Para Anggota Parlemen dapat mendorong guna memastikan bahwa rekomendasi-rekomendasi ini diintegrasikan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah mereka.

INDONESIA

Tujuan RAN*:

Pengurangan bersyarat gas rumah kaca sampai dengan 41% dari skenario 'business as usual' (BAU) pada 2030.

Taksiran RAN

+4 derajat**
✗ Sangat Tidak Mencukupi
✓Menyebutkan soal hak asasi manusia (HAM)
✗ Tidak ada komitmen meningkatkan sasaran pada 2020

Rekomendasi perbaikan:

- Tingkatkan sasaran dari tujuan RAN
- Disinvestasi batu bara dan akhiri secara bertahap penggunaannya pada 2040
- Akhiri secara bertahap subsidi bahan bakar fosil
- Pastikan Indonesia memenuhi target-target energi terbarukan
- Bicarakan masalah penebangan hutan, kebakaran dan asapnya
- Regulasikan ekspansi sektor minyak sawit, termasuk yang untuk biofuel.
- Tetapkan tenggat melalui legislasi untuk mencapai emisi nol neto gas rumah kaca
- Buat semua aliran dana sepenuhnya sejalan dengan tujuan Perjanjian Paris

MALAYSIA

Tujuan RAN*:

Mengurangi intensitas emisi gas rumah kaca dari PDB sebesar 45% pada 2030 relatif terhadap intensitas emisi dari PDB pada 2005.

Taksiran RAN:

✗ Tidak Mencukupi
✗ Tidak ada soal HAM
✗ Tidak ada komitmen meningkatkan sasaran pada 2020

Rekomendasi perbaikan:

- Tingkatkan sasaran tujuan RAN.
- Dorong pembangunan transportasi publik
- Buat semua aliran dana sepenuhnya sejalan dengan tujuan Perjanjian Paris
- Disinvestasi batu bara dan akhiri secara bertahap penggunaannya pada 2040
- Akhiri secara bertahap subsidi bahan bakar fosil
- Regulasikan ekspansi sektor minyak sawit, termasuk yang untuk biofuel dan tingkatkan standar sertifikasi
- Tetapkan tenggat melalui legislasi untuk mencapai emisi nol neto gas rumah kaca
- Buat komitmen pada perlindungan, promosi dan penghormatan HAM dalam aksi iklim.

THE PHILIPPINES

Tujuan RAN*:

Pengurangan bersyarat gas rumah kaca sampai sekitar 70% dari skenario 'business as usual' (BAU) pada 2030.

Taksiran RAN:

+2 derajat**
✓Menyebutkan soal HAM
✗ Kebijakan tidak pada jalur untuk memenuhi tujuan RAN
✗ Tidak ada komitmen meningkatkan sasaran pada 2020

Rekomendasi perbaikan:

- Tingkatkan sasaran tujuan RAN
- Ajukan RAN baru yang menjelaskan skenario business as usual
- Kuantifikasi emisi pemanfaatan lahan di masa mendatang
- Tetapkan tenggat melalui legislasi untuk mencapai emisi nol neto gas rumah kaca
- Akhiri secara bertahap subsidi bahan bakar fosil
- Buat semua aliran dana sepenuhnya sejalan dengan tujuan Perjanjian Paris
- Disinvestasi batu bara dan akhiri secara bertahap penggunaannya pada 2040

SINGAPORE

Tujuan RAN*:

Mengurangi Intensitas Emisi sebesar 36% dari tingkat pada 2005 di 2030 dan stabilisasi emisi dengan tujuan membuat puncaknya terjadi sekitar 2030.

Taksiran RAN:

+4 derajat**
✗ Sangat Tidak Mencukupi
✗ Tidak ada soal HAM
✗ Tidak ada komitmen meningkatkan sasaran pada 2020

Rekomendasi perbaikan:

- Tingkatkan sasaran tujuan RAN
- Bicarakan soal ketergantungan pada gas (bauran energi yang tidak terdiversifikasi memungkinkan munculnya ketergantungan pada bahan bakar fosil)
- Bicarakan rendahnya tingkat awal pajak karbon
- Tetapkan tenggat melalui legislasi untuk mencapai emisi nol neto gas rumah kaca
- Akhiri secara bertahap subsidi bahan bakar fosil
- Buat semua aliran dana sepenuhnya sejalan dengan tujuan Perjanjian Paris
- Disinvestasi batu bara (termasuk yang dari luar negeri) dan akhiri secara bertahap penggunaannya pada 2040.
- Buat komitmen pada perlindungan, promosi dan penghormatan HAM dalam aksi iklim.

THAILAND

Tujuan RAN*:

Mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 70% dari tingkat proyeksi BAU pada 2030.

Taksiran RAN:

✗ Tidak Mencukupi
✗ Tidak ada soal HAM
✗ Tidak ada komitmen meningkatkan sasaran pada 2020

Rekomendasi perbaikan:

- Tingkatkan sasaran tujuan RAN
- Perluas sistem transportasi ramah lingkungan
- Tetapkan tenggat melalui legislasi untuk mencapai emisi nol neto gas rumah kaca
- Akhiri secara bertahap subsidi bahan bakar fosil
- Buat semua aliran dana sepenuhnya sejalan dengan tujuan Perjanjian Paris
- Disinvestasi batu bara (termasuk yang dari luar negeri) dan akhiri secara bertahap penggunaannya pada 2040.
- Buat komitmen pada perlindungan, promosi dan penghormatan HAM dalam aksi iklim.

*Mengacu pada target emisi bersyarat dalam Rencana Aksi Nasional. Berbeda dari target tanpa syarat dalam RAN, target bersyarat tergantung pelaksanaannya pada penyediaan dana dari komunitas global.

**Artinya jika semua negara memiliki tingkat sasaran yang sama dibandingkan tingkat emisi mereka, suhu planet kita akan naik sebesar 4 (atau 2 untuk Filipina) derajat Celsius pada 2100.

Data menurut [The truth behind the climate pledges report](#), [UNFCCC NDC registry](#), [Climate scorecard](#), [Climate Action Tracker](#), [Climate Watch 2020 NDC Tracker](#), [NDC Explorer](#), [Climate Analytics report](#), [STOTEN 650 \(2\) 1858-1871](#), diakses Desember 2019.

FOR MORE INFORMATION:

- [Climate Action Tracker](#)
- [The Truth Behind the Climate Pledges, report](#)
- [United Nations Emissions Gap report 2019](#)
- [UNFCCC NDC registry](#)
- [Climate Watch 2020 NDC Tracker](#)

Jika Anda menginginkan informasi lebih lanjut atau dukungan untuk membicarakan isu-isu ini di negara dan parlemen Anda, silakan menghubungi Cannelle Gueguen-Teil di cannelle@aseanmp.org.

LAPHR ASEAN PARLIAMENTARIANS
FOR HUMAN RIGHTS

www.aseanmp.org | [twitter](#) / [facebook](#) / [instagram](#): @aseanmp

AUGUST 2020

**FRIEDRICH
EBERT**
STIFTUNG